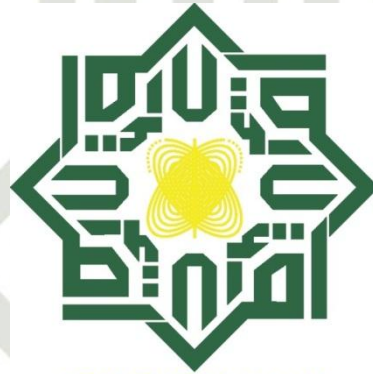


**PERAN KADER PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP) PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ILHAM GUSMI
NIM. 11324105458

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KADER PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP) PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ILHAM GUSMI
NIM. 11324105458

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

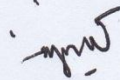
Skripsi dengan judul **“PERAN KADER PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Gusmi
NIM : 11324105458
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2019

Pembimbing Skripsi



Rahman Alwi, MA.

Nip. 197006211998031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyash*, yang ditulis oleh :

Nama : **Ilham Gusmi**
NIM : 11324105458
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M.A

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc. M.A

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah”.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat guna mewujudkan pemerintah yang baik. Oleh karena itu berarti Pilkada bukan hanya melibatkan para pemilihnya yang akan memilih pilihannya dan melaksanakan hak pilihnya tersebut, tetapi perlunya masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Di mana Pilkada dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk belajar bagaimana demokrasi sesungguhnya dan bagaimana mewujudkan Pilkada yang baik bagi semua belah pihak, baik pasangan yang menang maupun pasangan yang kalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017 dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kampar yang beralamat Jl. Sudirman Nomor 48 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah kader Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang menjadi pengurus di DPC PPP Kabupaten Kampar yang aktif dalam pemenangan calon saat Pilkada tahun 2017 yang berjumlah 58 orang, sedangkan sampel yang penulis gunakan sebanyak 10 orang dengan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diambil dari DPC PPP Kabupaten Kampar yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan penelitian ini, dan data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017 dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : a) tahap penjangkaran, b) tahap kampanye dan c) tahap pengawasan pemunculan suara. Sedangkan pandangan fiqh siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017 tidak menyalahi aturan fiqh siyasah, karena peran yang dilakukan kader PPP merekrut calon dengan musyawarah, dan melihat kemampuan dari calon yang diusungnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul: Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah. Skripsi yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak, penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada

1. Ayah Dalmi dan Ibu Wernalis tersayang yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA beserta wakil rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Hajar, MA beserta wakil dekan I, II dan III.



4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak H. Syamsuddin, Lc, MA yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Dosen Pembimbing Bapak Rahman Alwi, MA yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
 6. Penasehat Akademis Bapak Rahman Alwi, MA yang selalu membimbing dan memberikan solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
 7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 8. Segenap keluarga penulis abang, kakak serta adik yang telah memberikan motivasi, doa dan juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis,

ILHAM GUSMI
NIM : 11324105458

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan	13
B. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Tentang Teori Tentang Peran	32
1. Pengertian Peran	32
2. Aspek-Aspek Peran	33
B. Teori Tentang Kaderisasi	36
1. Pengertian	36
2. Kriteria Kader	39
3. Alternatif Model Kaderisasi	41
C. Teori Tentang Pemilihan Umum	43
1. Pengertian	43
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	44
3. Pemilihan Kepala Daerah	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teori Partai Politik	52
1. Pengertian	52
2. Fungsi Partai Politik.....	55
E. Konsep Siyasah Secara Umum	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar Dalam Pemenangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada Serentak Tahun 2017	63
B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar Dalam Pemenangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Stabilitas politik sangat penting untuk memfalsifikasi pelaksanaan pembangunan, proses pemilu yang aman, jujur, adil dan terbuka menjamin penerimaan hasil penghitungan suara oleh segenap warga negara, yang diharapkan mengantarkan bangsa Indonesia pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentram dan sejahtera.¹

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.²

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat guna mewujudkan pemerintah yang baik. Oleh karena itu berarti Pilkada bukan hanya melibatkan para pemilihnya yang akan memilih pilihannya dan melaksanakan hak pilihnya

Khelda Ayunda dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), cet. ke II, h. 142

Undang- Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, tetapi perlunya masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk belajar bagaimana demokrasi yang sesungguhnya dan bagaimana mewujudkan Pilkada yang baik bagi semua belah pihak, baik pasangan yang menang maupun pasangan yang kalah.

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia. Meskipun demokrasi tidak memiliki kebenaran mutlak, namun Indonesia sebagai penganut Islam terbesar dunia sangat dekat dengan demokrasi. Islam memandang demokrasi bukan satu-satunya cara, dalam artian demokrasi tidak memiliki pengakuan agama Islam secara mutlak.

Negara Indonesia dapat dilihat praktek demokrasi, misalnya pada pelaksanaan pemilu selama delapan kali sejak kemerdekaan. Pada pemilu, Indonesia telah mencoba mempraktekkan berbagai macam bentuk demokrasi, mulai dari demokrasi kuasa parlementer (1945-1949), demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1968-1997, sampai kepada demokrasi kerakyatan (1998-sekarang).³

Pada tahun 2017 yang lalu, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Propinsi Riau yang telah melaksanakan pesta demokrasi di seluruh Indonesia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Seiring dengan itu pelaksanaan Pilkada serentak pada saat itu merupakan kali pertama dalam sejarah Kabupaten Kampar ikut dalam pesta demokrasi secara serentak.

Pada saat pembentukan calon, sempat publik menghadirkan beberapa individu untuk dijadikan opsi sebagai calon. Namun mereka mengusulkan

Hafied, Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke I, h. 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon tersebut hanya sebatas dukungan masyarakat saja. Dalam tahap ini yang pernah dimunculkan publik lumayan banyak. Namun pada proses verifikasi, berkas yang sampai kepada KPU hanya lima pasangan calon. maka kandidat yang lolos verifikasi hanya lima pasangan calon yaitu M. Amin-M. Shaleh, Zulher-Dasril Afandi, Aziz Zainal-Catur Sugeng Susanto, Jawahir-Bardansyah Harahap dan Rahmad Javeri Juniardo-Khairuddin Siregar. Penetapan calon masing-masing kandidat diusung oleh beberapa partai yang membentuk suatu koalisi. Adapun partai pengusung calon pasangan Aziz Zainal dengan Catur Sugeng Susanto adalah 6 partai yaitu PPP, Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem dan PKB.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berperan aktif dalam pesta demokrasi. Ini dikuatkan karena calon Bupati merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan. Mereka berperan tidak hanya sebagai pendukung materi, namun mereka melakukan semuanya sejak awal proses Pilkada sampai pasca penetapan pemenang kandidat. Kader yang jumlahnya kurang lebih dua ribu orang tidak semuanya mendapat kesempatan memenangkan kandidat karena masing-masing alasan. Dari jumlah kader mereka jauh lebih sedikit dari jumlah kader partai Golongan Karya (Golkar) yang juga anggota tim koalisi.

Aziz Zainal sebagai calon Bupati yang merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Catur Sugeng Susanto adalah sebagai calon wakil Bupati yang merupakan kader Golongan Karya (Golkar).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya merupakan pasangan yang ideal untuk disandingkan, karena Aziz Zamal merupakan kader dari partai Islam yang ber lambang ka'bah.

Pemimpin yang hendak Allah utus pun disesuaikan dengan jenis makhluknya, sehingga tidak ada kesulitan bagi pengikutnya untuk berkomunikasi atau mencari solusi permasalahan. Hal yang tidak kalah penting adalah khalifah (pemimpin) itu tidak sekedar kemauan tetapi memiliki kriteria maupun keahlian di bidangnya. Sebagaimana Allah Swt menyebutkan dalam al-Quran yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisa' : 58).⁴

Permasalahan di sini adalah, meskipun persoalan politik merupakan bagian dari pada persoalan agama, bahkan politik boleh masuk dalam agama, menurut Yusuf al-Qardhawi, akan tetapi persoalan politik tidak seharusnya berjalan sendiri tanpa panduan syariat.⁵

Terkait hal ini pada Pilkada serentak Kabupaten Kampar tahun 2017 tentang program Tim Aziz-Catur untuk memenangkan kandidat yang mereka

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah, 2006), h. 87

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Agama dan Politik Wawasan Idel dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal*, alih bahasa oleh Ibnu Sham (Kuala Lumpur: Alam Raya Interprise, 2009), cet. ke II, h. 26

usung. Peran dari seorang kader sangat menentukan kemenangan calon yang diusung oleh partai tersebut.

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Jika dimasukan akhiran *an* menjadi peranan maknanya bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peranan juga dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain. Sementara peran dalam bahasa Inggris adalah “*actor*” yang merupakan pelaku dalam sebuah kejadian ataupun peristiwa.⁶

Dalam suatu organisasi maka dibutuhkan suatu kader yang solid. Kader adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga memiliki kemampuan yang di atas rata-rata.⁷

Dalam suatu sistem demokrasi banyak hal yang dilakukan oleh partai politik. Karena partai akan memberikan peran yang terbaik bagi kandidat yang akan di usungnya, supaya bisa mencapai target yang diinginkan oleh partai tersebut. Adapun bentuk-bentuk peran yang dilakukan adalah mengumpulkan massa, menggalakkan opini, mengajak masyarakat dan memberikan ceramah. Kader PPP berada di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi pemuda maupun di majlis taklim. Kerena mereka menganggap organisasi merupakan awal proses menuju suatu kesuksesan suatu partai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke I, h. 32 Peter Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press: 1991), cet.

Reza, www.bmpam-diy.org/kader. diakses tanggal 9 Mei 2018

Pada proses kampanye PPP melakukan perannya yang tidak hanya menguntungkan bagi tim koalisinya, akan tetapi berguna juga bagi umat Islam Kabupaten Kampar. Padahal masyarakat Kabupaten Kampar sudah mengenal PPP yang kuat dengan gerakan dakwahnya dalam berpolitik. Kemudian PPP Kabupaten Kampar bagi mereka adalah sebuah partai berideologi Islam yang selama ini merupakan salah satu partai Islam harapan masyarakat Kabupaten Kampar sebagai tonggak penegak syariat.

Permasalahan di sini adalah, pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Kampar untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Dalam hal peran para kader PPP bagaimana peran mereka ketika Pilkada serentak. Apakah PPP juga melakukan kemenangan yang sifatnya demi kepentingan koalisi. Karena menurut kacamata peneliti masih banyak yang belum terungkap tentang peran kader PPP bahkan sering tidak terlihat pengaruhnya dalam kemenangan calon selama proses Pilkada serentak. Padahal mereka telah melakukan banyak peran, seperti masa penjangkaran bakal calon, mereka telah melakukan usaha keras demi terjaminnya calon yang diusung tidak berlawanan dengan visi misi partainya juga keinginan masyarakat Kabupaten Kampar. Kemudian pada proses kampanye bagaimana mereka melakukan perannya yang tidak hanya menguntungkan bagi tim koalisinya, akan tetapi berguna juga bagi umat Islam Kabupaten Kampar.

Padahal masyarakat Kabupaten Kampar sudah mengenal PPP yang kuat dengan gerakan dakwahnya dalam berpolitik. Kemudian PPP Kabupaten Kampar bagi mereka adalah sebuah partai berideologi Islam yang selama ini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu partai Islam harapan masyarakat Kabupaten Kampar sebagai tonggak penegak syariat. Namun karena realita di lapangan, masyarakat Kabupaten Kampar tidak melihat peran kader PPP dalam tim koalisi sebagai garda depan membawa arus perjuangan mereka.

Sehubungan dengan permasalahan sosial tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam kemenangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2017 ?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam kemenangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2017 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2017.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kabupaten Kampar bagaimana peran kader PPP dalam memenangkan calon yang mereka usung.
- c. Memberi kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Kabupaten Kampar.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kampar yang beralamat Jl.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudirman Nomor 48 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang menjadi pengurus di DPC PPP Kabupaten Kampar yang aktif dalam pemenangan calon saat Pilkada tahun 2017. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilkada serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 menurut fiqh siyasah.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah kader Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang menjadi pengurus di DPC PPP Kabupaten Kampar yang aktif dalam pemenangan calon saat Pilkada tahun 2017 yang berjumlah 58 orang, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik *multi random sampling* (pengambilan sampel secara acak).

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), cet. ke-100

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari DPC PPP Kabupaten Kampar yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yaitu kader yang menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar.

6. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Analisa data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

F Sistematika Penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN,

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN KABUPATEN KAMPAR

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum Partai Persatuan Pembangunan dan gambaran umum Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN TOERITIS TENTANG PERAN, PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori tentang peran: pengertian peran, aspek-aspek peran. Teori tentang kaderisasi: pengertian, kriteria kaderisasi dan alternatif kaderisasi. Teori tentang pemilihan umum: pengertian, tujuan dan fungsi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Teori partai politik: pengertian dan fungsi partai politik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan, peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam kemenangan calon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017, dan pandangan fiqih siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN

KABUPATEN KAMPAR

A. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Masa Orde Baru

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja, SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.⁹

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah.

- 1) KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama
- 2) H.Mohammad Syafa'at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

⁹ Arsip Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kampar Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII
- 4) Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti
- 5) Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.¹⁰

Suatu deklarasi yang dirumuskan dari hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok partai persatuan pembangunan menyebutkan bahwa keempat partai politik Islam telah seiya-sekata untuk memfungsikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971 mengantarkan terbentuknya suatu format politik baru yang dikenal sebagai *the ruling party* (kelompok yang berkuasa) sistem dengan Golkar dan ABRI sebagai pilarnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu tersebut memberikan legitimasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan restrukturisasi sistem politik nasional.

Restrukturisasi ini yang melahirkan Partai Perrstuan Pembangunan (PPP). Sebelum membentuk PPP, negara Orde Baru telah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi kalau tidak melenyapkan karakter Islam dari partai-partai Islam seraya mendepak orang-orang yang dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan negara dari barisan kepemimpinannya. Kebencian Orde Baru terhadap Islam politik juga ditampakkan dalam pemakaian nama pengelompokkan fraksi Islam

¹⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di parlemen. Mulanya bernama “golongan spiritual” lalu menjadi “kelompok persatuan” dan terakhir menjelma menjadi partai persatuan pembangunan. Orde Baru sesungguhnya menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, penciptaan pemerintahan yang stabil mensyaratkan homogenitas sosial dan konsensus politik, sementara di sisi lain, pluralitas masyarakat (etnis, agama, dan politik) juga perlu dipertimbangkan dan dikelola agar tidak mengarah pada situasi konflik. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme pengelolaan agar pluralitas tidak berkembang secara destruktif. Orde Baru menerapkan kebijakan pluralisme terbatas sebagai manifestasi pemerintahannya. Dalam model pluralisme terbatas ini, partisipasi politik hanya diperbolehkan sepanjang berada dalam bingkai ‘korporatif’ negara. Jika tidak, maka partisipasi tersebut dianggap melawan kekuasaan negara.¹¹

Pada periode ini, karakter PPP seperti di atas ternyata melahirkan medan baru bagi pertarungan internal dari faksi-faksi yang membentuknya. Sekalipun demikian, meski di tengah marginalisasi politik orde baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan platform fundamental politiknya. Latar belakang elit dan semangat ideologis yang ada di dalamnya ikut menentukan corak politik PPP dalam melawan penetrasi dan intervensi rezim di kala itu. Sikap keras partai ini sering menjadi pilihan terakhir di saat kepentingan Islam dinilai terancam. Sikap itu terrefleksikan di berbagai pertarungan di

¹¹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat parlemen, seperti pada kasus pembahasan aliran kepercayaan, perjudian, rencana penetapan P4 dalam sidang umum (SU) MPR 1978, Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan tahun 1973, RUU parpol dan Golkar, tentang penyeragaman asas tunggal Pancasila tahun 1975.¹²

Sebagai partai ciptaan negara, PPP terjatuh kesulitan dalam membenarkan kehadirannya di hadapan para pendukungnya, bahkan di depan dirinya sendiri. Sebabnya dalam diri PPP telah hilang kesadaran untuk bersatu akibat meruncingnya persaingan persaingan antar faksi dalam mengedepankan agenda politik masing-masing. PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada periode ini terjadi perubahan yang mendasar yang menyangkut basis ideologi politik PPP. Untuk kali kedua rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, yakni melalui UU No. 5 Tahun 1985. UU ini mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, termasuk PPP, untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui kebijakan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan “dipaksa” untuk melepaskan asas dan lambangnya.¹³

Mulai saat itu, PPP mengalami disorientasi ideologis, pasalnya

¹² <http://digilib.unila.ac.id/13370/17/BAB%20IV.pdf>, diakses tanggal 13 Mei 2019

¹³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politiknya semakin kabur. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Pemberlakuan asas tunggal pancasila adalah puncak strategi Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi politik yang ada dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan otoritarian. Heterogenitas masyarakat, terutama yang berbasis agama, dipandang semata-mata sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga harus diamankan melalui penyeragaman ideologi, yakni Pancasila.¹⁴

b. Pasca Orde Baru

Perubahan mendasar yang terjadi pada sistem politik Orde Baru menjadi orde reformasi, juga berpengaruh secara mendasar terhadap paradigma politik para pelakunya. Gugatan dan keinginan kuat untuk membongkar sistem politik Orde Baru yang telah berjaya selama 30 tahun menjadi basis utama bagi gerakan politik orde reformasi. Sementara itu muncul *euforia* masyarakat dalam meluapkan partisipasi politiknya karena yang selama ini tersumbat. Krisis multidimensi sebagai akibat dari sistem politik lama telah membawa korban jatuhnya rezim Soeharto dan kesengsaraan rakyat. Kondisi ini menjadi referensi penting bagi pembentukan sistem politik yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Keinginan kuat untuk membangun

¹⁴ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sistem politik baru yang demokratis menjadi agenda yang didesakkan oleh semua elemen politik.¹⁵

Munculnya banyak partai di masa ini adalah salah satu fenomena terpenting yang patut dicatat. Fenomena ini menjadi bagian dari ledakan partisipasi politik massa yang sebelumnya pernah tersumbat. Pada konteks inilah, yang diiringi dengan keinginan kuat untuk menciptakan sistem politik baru yang demokratis, dorongan untuk menggali potensi-potensi politik yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan dasar (ideologis, agama) yang dimiliki bersama menjadi bagian dari dinamika obyektif di era ini. Kembalinya potensi-potensi politik aliran muncul sebagai wacana yang cukup kuat pada era reformasi. Wacana ini merupakan cermin dari pluralisme sosial politik masyarakat Indonesia, serta kuatnya kepentingan dan persaingan antar potensi tersebut. Lahirnya partai-partai yang berbasis Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempresentasikan Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai representasi Muhammadiyah, maupun partai-partai lainnya yang mengandalkan basis dukungan umat Islam, seolah menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi PPP untuk memperbaharui dan mengkaji ulang eksistensinya.¹⁶

Runtuhnya kekuasaan politik era Orde Baru, membawa tantangan baru bagi PPP. Partai yang telah cukup lama malang-melintang dalam kancah politik nasional selama Orde Baru ini

¹⁵ Ibid
¹⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihadapkan pada kenyataan tentang memori kolektif rakyat yang menempatkan PPP sebagai pendukung politik Orde Baru. Akibat keterlibatan dalam perpolitikan Orde Baru, PPP kurang memperoleh apresiasi sebagai elemen dan kekuatan pendukung reformasi.¹⁷

Partai ini dianggap residu politik yang ikut bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang terpuruk. Situasi inilah yang menciptakan pandangan negatif terhadap PPP. Namun di tengah apriori yang memuncak ini, PPP tidak tinggal diam. Ketika ruang publik terbuka sebagai dampak liberalisasi politik, PPP berusaha menjelaskan posisi politiknya yang marginal di masa Orde Baru. Marginalitas yang telah dimulai sejak kebijakan fusi partai itu sendiri, yang mengubah rungsi partai dari sebagai pranata masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, keberbagai pihak atau pendamping pemerintah. PPP yang mestinya berfungsi sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik, serta rekrutmen dan pembuatan kebijakan, dikempiskan hanya sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Sisi marginalitas inilah yang dijadikan modal utama PPP untuk membangun citra diri dalam memasuki era reformasi.¹⁸

Pada era reformasi ini memberi wacana baru sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik PPP. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Tuntutan PPP agar segera mengubah diri dilancarkan oleh sekelompok kadernya yang tergabung dalam Komite Reformasi Partai Persatuan Pembangunan (KR-PPP). Komite ini mendesak agar partai segera mengadakan muktamar dengan menuntut agar Buya Ismail turun dari jabatannya sebagai ketua umum karena dinilai telah memanipulasi hasil rapim PPP dengan mendukung pencalonan Soeharto. Dalam muktamar tersebut, banyak pendapat di dalam tubuh PPP menghendaki kembalinya Islam bukan sekedar sebagai identitas partai, namun sekaligus sebagai asas partai. Karenanya, setelah berhasil memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai Islam dalam sidang istimewa MPR 1998.

Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP. Kembalinya PPP ke asas Islam merupakan kembalinya PPP ke khittah 1973. Pergantian asas PPP ini juga menandai fase baru dalam pergeseran dan dinamika internal yang bersifat ideologis PPP, yang semula dihancurkan oleh rezim Orde Baru melalui ideologisasi politik. Dari kembalinya PPP ke asas Islam diharapkan untuk bisa memperbaiki citra politik PPP yang kritis terhadap pemerintah.

Sementara itu sebelum keputusan tentang pergantian asas dan simbol diambil, secara kelembagaan PPP telah mencermati perjalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kondisi bangsa Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir yang dipandanginya sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan oleh merebaknya tindak kekerasan, ketidakjujuran, konflik antar suku, golongan, kelompok, dan agama. Akibatnya adalah melemahnya kehidupan perekonomian, sosial, dan politik, serta merapuhnya semangat persatuan bangsa yang mengancam integritas bangsa dan karakter bangsa.¹⁹

Menurut Abdul Azis, ada dua makna politik dalam memahami kembalinya PPP ke azas Islam, yaitu: Pertama, yakni sebagai langkah pragmatis, hal ini tidak terlepas dari tantangan baru yang dihadapi PPP di era multi partai ini. Munculnya berbagai partai politik baru yang mengandalkan basis dukungan selama ini dimiliki oleh PPP, hal ini memunculkan kegaman dan skeptisme di dalam tubuh PPP. Kedua, merupakan refleksi dari salah satu kebutuhan pokok PPP sebagai partai politik, yakni merumuskan (kembali) basis ideologisnya selepas diceraikan dari Islam politik pada masa Orde Baru. Deideologisasi politik Orde Baru diakui telah memandulkan Islam politik sebagai pusat orientasi perjuangan.²⁰

2. Azas dan Tujuan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Berdasarkan pada Pasal 2 dan 3 AD/ART Partai Persatuan Pembangunan berazaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan Demokratis dalam

¹⁹ Ibid
²⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah SWT.²¹

3. Visi dan Misi Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

b. Misi

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/ leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama

manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.²²

4. Bentuk Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Pada penjelasan AD/ART PPP Pasal 10 tentang Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disusun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan, yaitu:

- a. Tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara, disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPP PPP.
- b. Tingkat Provinsi, berkedudukan di ibu kota Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPW PPP.
- c. Tingkat Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota, disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Singkat DPC PPP
- d. Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan disingkat PR PPP.²³

5. Struktur Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar

²² Ibid

²³ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi PPP dituntut untuk bekerja secara professional. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai. Adapun susunan dan personalia pimpinan majelis syariah Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP)

Kabupaten Kampar Masa Bakti 2016-2021 adalah :

Ketua	: KH. Supri Harahap
Wakil ketua	: Hartono
Wakil ketua	: Awaludin
Wakil ketua	: H. Supardi
Wakil ketua	: H. Dadang Muslim
Sekretaris	: Asril
Wakil sekretaris	: H. Sudirman
Wakil sekretaris	: Masnur
Wakil sekretaris	: Hasbi Alfajri
Wakil sekretaris	: Darnius Padas
Anggota	: H. Syahril Khatib
Anggota	: Syafi'i
Anggota	: Jhon Hasnur

Sedangkan susunan dan personalia pengurus harian cabang majlis syariah, majlis pertimbangan dan majlis pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kampar masa bakti 2016-2021 adalah :

1. Ketua
2. Wakil ketua Bid. Organisasi, keanggotaan dan kaderisasi
3. Wakil ketua Bid. Agama dan dakwa
4. Wakil ketua Bid. Advokasi hukum dan HAM
5. Wakil ketua Bid. Hubungan antar lembaga
6. Wakil ketua Bid. Pengelolaan ZIS dan wakaf
7. Wakil ketua Bid. Teknologi dan informasi
8. Wakil ketua Bid. Komunikasi dan hubungan media
9. Wakil ketua Bid. Pemenangan pemilu anak cabang
10. Wakil ketua Bid. Pembangunan koperasi dan wirausaha
11. Wakil ketua Bid. Pendidikan dan kebudayaan
12. Wakil ketua Bid. Kesehatan dan kesejahteraan
13. Wakil ketua Bid. Pemberdayaan perempuan dan anak
14. Wakil ketua Bid. Pemuda dan olahraga
15. Wakil ketua Bid. Penguatan ideologi
16. Wakil ketua Bid. Pembangunan ekonomi kreatif
17. Wakil ketua Bid. Pembangunan Desa
18. Sekretaris
19. Wakil Sek. Bid. Organisasi, keanggotaan dan kaderisasi
20. Wakil Sek. Bid. Agama dan dakwa
21. Wakil Sek. Bid. Advokasi hukum dan HAM
22. Wakil Sek. Bid. Hubungan antar lembaga
23. Wakil Sek. Bid. Pengelolaan ZIS dan wakaf
24. Wakil Sek. Bid. Teknologi dan informasi
25. Wakil Sek. Bid. Komunikasi dan hubungan media
26. Wakil Sek. Bid. Pemenangan pemilu anak cabang

: Hendra Yani
: Limasnur
: Abu Bakar
: H. Mahfuzat
: Said Abdullah
: Yuslim
: Atia Desi Fonica
: Rina Dianti, H
: Rahmadis
: H. Syafrianto
: H.M Nur
: Herianto
: Nailal Fadhila
: Nazaruddin
: Abd. Musnil, A
: Yuliza Zein
: Hj. Rosnawati
: M. Ansar
: Dedi Alnando
: Rahma, T
: Joni Alizoa
: Riski Hamdani
: Bahrul Fahmi
: Fauziah
: Yusroni Tarigan
: Djohan Patris

27. Wakil Sek. Bid. Pembangunan koperasi dan wirausaha : Zamhar
28. Wakil Sek. Bid. Pendidikan dan kebudayaan : Baharuddin, N
29. Wakil Sek. Bid. Kesehatan dan kesejahteraan : M. Arif
30. Wakil Sek. Bid. Pemberdayaan perempuan dan anak : Afridawati
31. Wakil Sek. Bid. Pemuda dan olahraga : Hindi Junaidi
32. Wakil Sek. Bid. Penguatan ideologi : Rizal Mahyuna
33. Wakil Sek. Bid. Pembangunan ekonomi kreatif : Derwati, S
34. Wakil Sek. Bid. Pembangunan Desa : Hirayani
35. Bendahara : Habiburrahman
36. Wakil bendahara : H. Supriadi
37. Wakil wakil : Tiswarni

Adapun nama-nama Pimpinan Ranting (Kecamatan) PPP di Kabupaten

Kampar masa bakti 2016-2021 adalah :

Tabel II.1

Nama-Nama Pimpinan Ranting (Kecamatan) PPP di Kabupaten Kampar

No	Nama	Kecamatan
1.	Muhardi	Kampar
2.	Nizam Akbar	Kampar Kiri Hulu
3.	Darmawan	Kampar Kiri Hilir
4.	Ali Sadikin	Kampar Kiri Tengah
5.	Hamdi	Gunung Sahilan
6.	Gulnaldi	XIII Koto Kampar
7.	Azmi	Koto Kampar Hulu
8.	Awang Taufik	Kuok
9.	Muhammad Syulfi	Salo
10.	Rasidul	Tapung
11.	Suratman	Tapung Hulu
12.	Heri Prasetyawan	Tapung Hilir
13.	Zulkifli	Bangkinang
14.	Muhammad Naufal	Bangkinang Kota
15.	Dariatmo	Tambang
16.	Sahidun Firdaus	Kampa
17.	Barkani	Rumbio Jaya
18.	Tarmizi	Kampar Utara
19.	Aziz Akmal	Tambang
20.	Silvia Ambar	Siak Hulu
21.	zulhadri	Perhentian Raja

Sumber: Kantor DPC PPP Kabupaten Kampar Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : IO/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu. Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

- Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau.
- Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.²⁴

²⁴ Arsip Dinas Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum). Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
 - b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
 - c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.²⁵
2. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai

²⁵ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" -101014'30" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM² atau $\pm 11,62\%$ dari luas wilayah Propinsi Riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM² (12,10%). Sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam 21 Kecamatan. Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan daerah atau kabupaten lain di antaranya :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Propinsi Sumbar)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.²⁶

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2018 berjumlah 753.681 jiwa, terdiri dari 389.148 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 364.533 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Kampar dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah Penduduk
1	Kampar	14.883	13.820	28.702
2	Kampar Kiri Hulu	5.881	5.671	11.552
3	Kampar Kiri Hilir	5.779	5.256	11.055
4	Kampar Kiri Tengah	13.556	12.294	25.850
5	Gunung Sahilan	9.914	8.874	18.787
6	XIII Koto Kampar	11.907	11.296	23.203
7	Koto Kampar Hulu	9.405	8.825	18.230
8	Bangkinang Barat	12.250	11.997	24.248
9	Salo	12.746	12.210	24.957
10	Tapung	47.284	42.847	90.128
11	Tapung Hulu	39.930	36.200	76.128
12	Tapung Hilir	29.854	27.262	57.115
13	Bangkinang	19.215	18.580	37.796
14	Bangkinang Seberang	16.152	15.720	31.873
15	Tambang	24.528	24.282	48.813
16	Kampa	11.857	11.486	23.344
17	Rumbio Jaya	8.444	8.185	16.630
18	Kampar Utara	8.274	8.329	16.609
19	Tambang	29.744	27.931	57.676
20	Siak Hulu	48.683	45.425	94.108
21	Perhentian Raja	8.837	8.043	16.880
Jumlah		389.148	364.533	753.681

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2019

²⁶ Ibid

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar bisa dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	309
2	SD	474
3	MI	17
4	SMP	92
5	MTs	80
6	SMA	41
7	SMK	17
8	MA	46
9	Perguruan Tinggi	3
Jumlah		1.079

Sumber: Dinas Pemerintahan Kabupaten Kampar 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar terdapat 309 unit Taman Kanak-kanak, 474 unit Sekolah Dasar, 17 unit Madrasah Ibtidaiyah, 92 unit SMP, 41 unit SMA, 17 unit SMK, 46 unit Madrasah Aliyah dan 3 unit Perguruan Tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TOERITIS TENTANG PERAN, PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK

A. Teori Tentang Peran

1. Pengertian peran

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Jika dimasukan akhiran (*an*) menjadi peranan maknanya bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.²⁷ Peranan juga dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain. Sementara peran dalam bahasa Inggris adalah “*actor*” yang merupakan pelaku dalam sebuah kejadian ataupun peristiwa.²⁸

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawaikan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawaikan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role perfomance*).²⁹

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang

²⁷ Salim Peter, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press: 1991), cet. ke I, h. 1132

²⁸ Jhon Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1998), cet. ke I, h. 421

²⁹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), cet. ke II, h. 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Oleh karena itu, seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.³⁰

2. Aspek-Aspek Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono, membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:³¹

a. Orang yang berperan

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

b. Perilaku dalam peran

Ada beberapa hal tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, sebagai berikut :

- 1) Harapan tentang peran (*expectation*)

³⁰ Ibid

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. ke III, h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2) Harapan dalam norma

- a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.
- c) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- d) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

4) Penilaian dan sanksi

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.³²

³² Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

d. Kaitan orang dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Ada beberapa poin untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut :

- 1) Kriteria kesamaan
- 2) Derajat saling ketergantungan
- 3) Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan³³

B. Teori Tentang Kaderisasi

1. Pengertian

Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena Kaderisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang

³³ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.³⁴

Menurut Toni Andrianus, kaderisasi lebih bersifat sebagai proses “intervensi” dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti penting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik.³⁵

Menurut Tohirin, kader adalah pendukung yang telah menjadi anggota dari partai politik tertentu yang ditentukan berdasarkan mekanisme rekrutmen yang berlaku dalam setiap partai politik”. Mereka ini berikutnya akan diproyeksikan untuk tampil sebagai penggerak roda organisasi partai, baik sebagai pengelola atau pemimpin partai maupun untuk menjadi pejabat-pejabat publik yang direkomendasikan oleh partai.³⁶

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk

³⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke II, h. 25

³⁵ Toni Andrianus, *Mengenal Teori-Teori Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), cet. ke III, h. 13

³⁶ Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke II, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

1. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
2. Penugasan kader, di mana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
3. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.³⁷

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat

³⁷ Ibid, h. 41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya³⁸

Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah, umat terbaik. sesuai dengan Firman Allah Swt dalam al-Quran yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali Imran: 110).³⁹

2. Kriteria kader

Agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka kader partai harus terlebih dahulu bersepakat dengan garis ideologi dan aturan-aturan yang berlaku dalam partai. Ini misalnya ditunjukkan dengan penerimaan terhadap AD/ART dan arah perjuangan partai. Konsekuensinya, saat bersamaan, partai politik tidak dapat mentoleransi kader-kadernya yang secara fundamental tidak bersepakat dengan kepemimpinan dan ide-ide perjuangan partai, loyal kepada partai lain atau

³⁸ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), cet. ke II, h. 408

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak untuk terlibat kerja dalam struktur partai. Namun demikian, setiap partai politik harus tetap terbuka bagi munculnya berbagai pandangan maupun inisiatif dari individu-individu partai. Ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam partai politik. Artinya, partai politik sungguhpun dituntut untuk memiliki konsistensi ideologi dan format organisasi yang koheren dengannya, namun harus memperhatikan munculnya ide-ide dan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan obyektif yang ada.⁴⁰

Demi mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan kebutuhan partai, maka tiap partai memiliki kriterianya masing-masing. Perbedaan kriteria kader ini adalah konsekuensi dari perbedaan tipe partai, sungguhpun kombinasi juga dimungkinkan karena pergeseran kecenderungan dari partai yang bersangkutan. Adapun kriteria kader terbagi kepada tiga bentuk:⁴¹

a. Partai masa

1. Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai.
2. Kader memiliki kedekatan sejarah sosio-kultural dengan basis sosio-kultural pendukung partai.
3. Kader harus dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai.
4. Kader adalah simpul mobilisasi pendukung partai (simpul massa).

⁴⁰ Toni Andrianus, *op.cit*, h. 22

⁴¹ *Ibid*, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Partai kader

1. Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai meskipun mungkin dalam batas yang cair.
2. Kader dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai namun bisa juga tidak.
3. Kader memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan memiliki kapasitas menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Kader tidak mesti menjadi simpul massa / mobilitas massa.

c. Partai *catch all*

1. Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai meskipun mungkin dalam batas yang sangat cair.
2. Kader memiliki kesesuaian dengan isu-isu utama partai bagi kemenangan pemilu.
3. Kader tidak mesti berasal melalui kaderisasi formal partai, namun bisa juga berasal dari mantan anggota atau kader partai lain.
4. Kader memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan memiliki kapasitas menduduki jabatan-jabatan publik.⁴²

3. Alternatif model kaderisasi

Mendapatkan kader-kader dengan kriteria yang dibutuhkan maka partai politik butuh untuk mendesain sistem kaderisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan partai untuk menjawab tantangan kebutuhan. Berikutnya, untuk menjamin keberlanjutan kaderisasi, maka sistem

⁴² Ibid, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaderisasi ini butuh dilembagakan segera formal dalam satu lembaga khusus yang dalam logika struktur fungsi, format kelembagaannya akan mengikuti fungsi-fungsi yang dibebankan dalam sistem kaderisasi. Adapun bentuk-bentuk alternative model kaderisasi adalah :⁴³

a. Kebutuhan

- 1) Kebutuhan untuk menduduki jabatan-jabatan publik
- 2) Kebutuhan mengorganisir dan memobilisasi massa pendukung
- 3) Menjadi jembatan komunikasi antara partai dengan pendukung, publik luas dan media massa
- 4) Kebutuhan kemampuan penggalangan dana

b. Sifat

- 1) Hierarki/Penjenjangan
 - a) Tingkat dasar
 - b) Tingkat menengah
 - c) Tingkat lanjut
 - d) Campuran/kombinasi
- 2) Spesialisasi/keahlian
 - 1) Training policy making (*bassed issue*)
 - 2) Training Organizer
 - 3) Training Fund raise
 - 4) Training berbasis isu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lembaga

- 1) Lembaga pengkaderan tingkat nasional
- 2) Lembaga pengkaderan tingkat Provinsi
- 3) Lembaga pengkaderan tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Lembaga pengkaderan tingkat desa.⁴⁴

Teori Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa: pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Haris merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁴⁶ Menurut Rizkiyansyah pemilihan

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁴⁶ Haris Sumadiri, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), cet. ke II, h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum adalah salah satu pranata yang paling presentatif atas berjalannya demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum.⁴⁷

Sedangkan menurut Dani, pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.⁴⁸

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

a. Tujuan

Pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yaitu :

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dalam alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴⁹

⁴⁷ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*, (Bandung: Idea Publishing, 2007), cet. ke I, h. 3

⁴⁸ Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke III, h. 11

⁴⁹ Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP21 Presss, 2013), cet. ke III, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Fungsi

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu sendiri adalah:⁵⁰

1) Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintahan berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

2) Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

3) Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang

⁵⁰ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *op.cit*, h. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pendidikan politik ini dilakukan oleh partai politik karena partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 bemaafkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵²

Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut C.S.T. Kansil, kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari negara

⁵¹ Ibid

⁵² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. cet. ke I, 78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu adanya pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas (*unlimited*). Dalam arti kenegaraan, kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara tersebut.⁵³

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵⁴

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵

⁵³ Ibid, h. 80

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁵⁵ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan di atas diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah:⁵⁶

- a. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah
- b. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing daerah
- c. Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat masing-masing daerah
- d. Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.

Menurut Sarundajang, pemberian otonomi kepada daerah mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu :⁵⁷

- 1) Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah

⁵⁶ Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), cet. ke II, h. 110

⁵⁷ Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Jaya, 2001), cet. ke II, h. 130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya gunadan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat
- 3) Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya
- 4) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.⁵⁸

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya, yang paling menonjol di sini adalah pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa Kepala Daerah. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat 4 UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵⁹

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis”

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah
⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pemilhan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. ke IV, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 ayat 4 UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini. Diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan diganti menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan. Dasar hukum untuk pemilihan kepala daerah saat ini adalah Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan: Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pada Pilkada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serentak, pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU. Pelaksanaan secara serentak ini diharapkan anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada menjadi lebih minim. Maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2015 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan serta dengan benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensial.⁶⁰

D. Teori Partai politik

1. Pengertian

Partai politik adalah berasal dari dua kata yaitu, Partai dan Politik.

Partai dalam kamus bahasa Inggris adalah “*Party*” semakna juga dengan *sport event*. Sebenarnya partai berasal dari bahasa Latin, “*darti verba partire*”, yang artinya membagi (*to divide*).⁶¹

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pemilhan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. ke IV, h. 2

⁶¹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), cet. ke II, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁶²

Partai politik menurut Miriam Budiardjo merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.⁶³

Partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik

⁶² Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke III, h. 4

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke III, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.⁶⁴

Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), cet. ke II, h. 102

⁶⁵ Inu Kencana Syafi'i dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), cet. ke II, h. 75

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁶⁶

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik

⁶⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan suka rela, gerakan protes dan sebagainya. Partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing.⁶⁷

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka dapat memberikan model partisipasi menjadi empat tipe :

⁶⁷ Firmansyah: Partisipasi politik masyarakat. <http://sacafirmansyah.wordpress.com>. diakses tanggal 02 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
2. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
3. Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku politik yang muncul ialah militant radikal (cenderung kekerasan).
4. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik menjadi sangat positif, artinya hanya berorientasi terhadap output politik. Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri (variabel independen) artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti status sosial dan ekonomi, akses politik orang luar, pengalaman berorganisasi. Oleh karena itu hubungan dari faktor-faktor dapat digambarkan seperti halnya status sosial dan ekonomi, akses politik, pengalaman berorganisasi merupakan variabel pengaruh atau independen. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel atau intervening.⁶⁸

Partisipasi politik lebih didasarkan pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik menjadi beberapa bentuk seperti:

⁶⁸ Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. ke III, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegiatan memilih. Yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- 2) Lobby. Yaitu upaya perorangan atau suatu kelompok yang melalui seorang pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- 3) Kegiatan organisasi. Yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 4) Koneksi. Yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan atau hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- 5) Tindakan kekerasan. Yaitu suatu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik atau harta benda, seperti halnya teror, kudeta, revolusi dan pemberontakan.⁶⁹

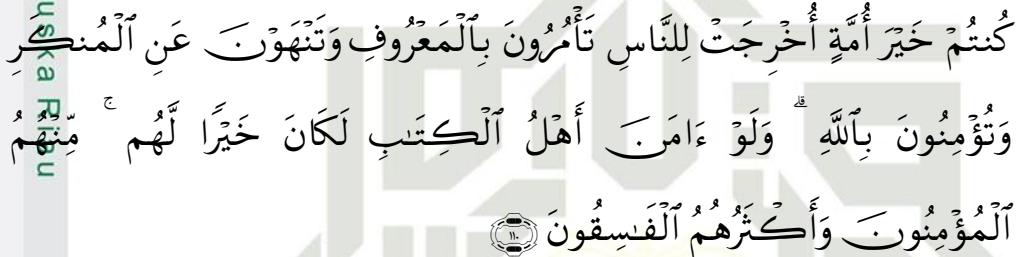
E. Konsep siyasah secara umum

Politik atau fiqh siyasah adalah bagian dari *ulumul syar'i* (ilmu agama) yang dalam fiqh Islam terdapat dalam bab *imamah* dan *jihad*. Secara etimologi, fiqh siyasah adalah ilmu yang mengatur tentang urusan negara baik

⁶⁹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti, 1995), jilid I, h. 103

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkupnya adalah *ri'ayah* (memelihara), *riayah* (kepemimpinan), *idaroh* (manajemen), *nizhom* (peraturan) dan *tahtid* (program). Imam Al-Ghazali sendiri berujar, “syari’ah harus dilindungi dengan *daulah* (negara atau politik).” Itu semua terkait dengan misi besar seorang muslim. Sebagai difirmankan Allah dalam surat al-Imran ayat 110 yang berbunyi :



Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁷⁰

1. *Ri'ayah* (memelihara)

Artinya: Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

Inilah yang dipraktekkan seorang Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang rela berhitam-lebam punggungnya mengangkut berkarung-karung beras demi rakyatnya yang lapar. Secara luas, beliau adalah salah seorang Khalifah yang dicatat dengan tinta emas akan kebijakan-kebijakan administrasinya yang luar biasa dan berpihak pada kaum miskin, seperti menurunkan standar mahar (mas kawin) yang sangat selangit saat itu, dan menetapkan subsidi sosial dari *baitul maal* negara untuk rakyat miskin.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 64

2. *Riasah* (kepemimpinan)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Memilih pemimpin tidak sekedar atas prinsip demokrasi *vox populi vox dei* (suara rakyat suara Tuhan) yang sangat kita ragukan legitimasi akidahnya atas nama Islam. Tetapi memilih pemimpin adalah hal esensial yang akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah di hari kiamat nanti. Bahkan sejarah Islam mencatat upacara pemakaman Rasulullah pun tertunda karena prioritas pemilihan khalifah yang akan memegang tampuk kepemimpinan ummat selanjutnya. Jelas ini bukan sekedar kebetulan biasa. Ini jelas sebuah sinyal betapa pentingnya kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Terlebih lagi bagi yang dipilih menjadi pemimpin di mana ia harus berlaku amanah dan tidak boleh meminta-minta jabatan. Seorang Umar bin Khattab bahkan sepanjang masa pemerintahannya tidak bisa tidur lalap karena memikirkan nasib rakyatnya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan menyatakan: jika ada ada seekor keledai sekalipun mati kelaparan di tepi sungai Eufрат (wilayah Irak sekarang), jelas itu tanggung jawabku yang akan aku pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Idaroh* (manajemen)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَنٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. (QS. ash-Shaff: 4).⁷¹

Kepemimpinan adalah bagaimana melakukan hal yang benar, dan manajemen adalah bagaimana melakukan hal dengan benar. Khalifah Ali bin Abi Thalib Karomallahu wajhah juga berkata: Kebatilan yang terorganisasi akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi.

4. *Nizhom* (peraturan)

Segala sesuatu ada aturannya. Bahkan burung bangau yang bermigrasi lintas benua pada setiap pergantian musim pun tertib mengikuti aturan terbang dalam pola huruf “V” bersama kawanannya. Tidak dapat semua dinisbikan atau ditiadakan atas nama demokrasi. Sesungguhnya batas kebebasan seseorang adalah hak orang lain.

5. *Tahtid* (program)

Artinya: Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang pada kebenaran). Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang yang mempersekutukan Allah.⁷²

Selain unsur pemeliharaan, kepemimpinan, manajemen, aturan maka unsur pokok yang merupakan ujung tombak di lapangan adalah program. Kepedulian yang sedemikian tinggi serta kebijakan yang baik adalah nihil jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Salah satu

⁷¹

⁷²



elemennya adalah keteladanan. Dengan keteladanan, orang akan melihat integritas seseorang dan bukti antara perkataan dan perbuatannya. Demikian banyak pemimpin di negeri ini gagal karena berbeda antara kata dan perbuatannya. Negeri ini pun terperosok karena kurangnya integritas pemimpin dan kalangan politisinya. Seperti perkataan Syaikh Asy-Syahid Izzuddin Al Qossam, mujahid Palestina pada perang 1948: Dunia Islam tengah terbakar, marilah kita memadamkannya, walau dengan sepercik air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam kemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017 dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : a) tahap penjaringan, b) tahap kampanye dan c) tahap pengawasan pemungutan suara.
2. Pandangan fiqih siyasah terhadap peran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar dalam kemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada serentak tahun 2017 tidak menyalahi aturan fiqih siyasah, karena peran yang dilakukan kader PPP merekrut calon dengan musyawarah, dan melihat kemampuan dari calon yang diusungnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 58.

B. Saran-Saran

1. Karena pilkada merupakan pesta demokrasi, maka semua yang terlibat agar selalu menyumbangkan kontribusi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Partai politik merupakan salah satu yang berperan dalam pilkada, oleh karena itu partai politik mestilah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partainya.



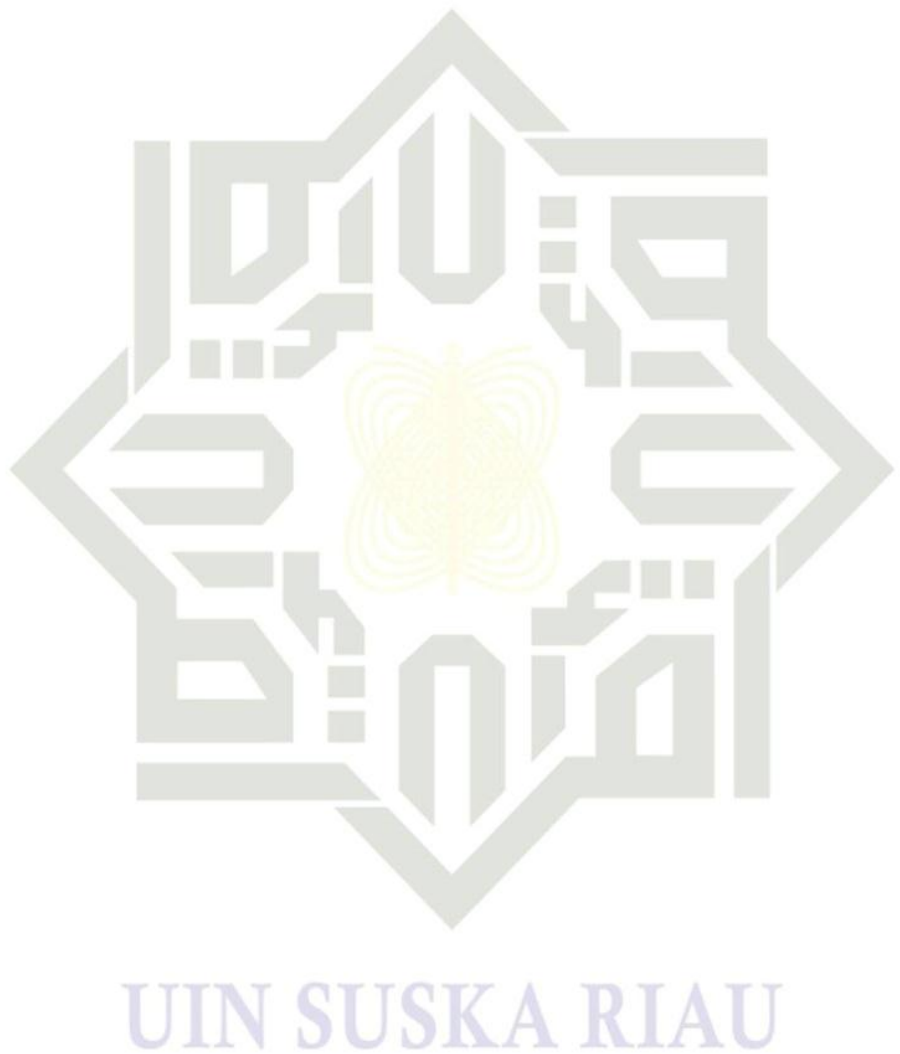
3. Koalisi politik mestilah dijalankan dengan kerjasama dan sama-sama bekerja dan menanamkan keikhlasan demi kepentingan masyarakat banyak.
4. Partai Islam semestilah menanamkan nilai agama Islam sebelum nilai Pancasila sebagai ciri khas dan demi menjaga kebaikan agama Islam itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





DAFTAR PUSTAKA

1. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007, cet. ke II.
2. At-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2013, cet. ke III.
3. Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqih an-Nashir wa At-Tamkin*, alih bahasa oleh Samson Rahman, Jakarta: Al-Kausyar, 2001, cet. ke II.
4. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, cet. ke I, h. 100.
5. Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, cet. ke II.
6. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. cet. ke I.
7. Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, cet. ke II.
8. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*, Bandung: Idea Publising, 2007, cet. ke I.
9. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, cet. ke II.
10. Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, cet. ke I.
11. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Beritad dan Feature Panduan Praktis Jurnalis*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006, cet. ke II.
12. Inu Kencana Syafi'i dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet. ke II.
13. Jhon Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1998, cet. ke I.
14. Jimly Asshiddiqie, *Pemilhan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, cet. ke IV.
15. Jimly Asshiddiqie, *Pemilhan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, cet. ke IV.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21 Presss, 2013, cet. ke III.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah, 2006.
- Khelda Ayunda dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), cet. ke II.
- Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, cet. ke II.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet. ke III.
- Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet. ke III.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, cet. ke III.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Peter Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press: 1991, cet. ke I.
- Said Hawa, *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abd Hayyie al-khatani.dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004, cet. ke II.
- Salim Peter, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press: 1991, cet. ke I.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti, 1995, cet. ke I.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, cet. ke III.
- Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Jaya, 2001, cet. ke II.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011, cet. ke II.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, cet. ke III

Sudirman Jhohan, *Politik Keagamaan dalam Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 1995, cet. ke II.

Tahirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, cet. ke II.

Toni Andrianus, *Mengenal Teori-Teori Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2006, cet. ke III.

Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Yusuf al-Qardhawi, *Agama dan Politik Wawasan Idel dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal*, alih bahasa oleh Ibnu Sham, Kuala Lumpur: Alam Raya Interprise, 2009, cet. ke II.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih
Siyasah, yang ditulis oleh :

Nama : **Ilham Gusmi**
NIM : 11324105458
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

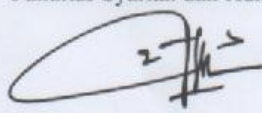
Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M.A

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc. M.A

Kepala Bagian Tata Usaha / *Kabang Kure*
Fakultas Syariah dan Hukum


Eri Surianto, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2049/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ILHAM GUSMI
NIM : 11324105458
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten
Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 11005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FAKULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645

Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/28/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : ILHAM GUSMI
N I M : 11324105458
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

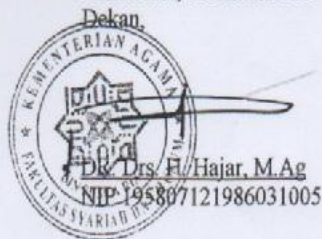
UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **4 DESEMBER 2018**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كافة الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul “ PERAN KADER PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (PPP) PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH” di tulis oleh saudara :

Nama : Ilham Gusmi
NIM : 11324105458
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Di seminarikan pada

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2018
Narasumber : Dr. Johari, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bag. Akademik

Rosmihti, S.Ag
NIP. 197409102003122003

Pekanbaru, 7 November 2018
Narasumber

Dr. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/21045
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2049/2019 Tanggal 8 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ILHAM GUSMI**
2. NIM / KTP : **11324105458**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN KADER PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 MENURUT FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 April 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/267

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/21045 tanggal 01 April 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : ILHAM GUSMI |
| 2. NIM | : 11324105458 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PERAN KADER PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH |
| 8. Lokasi | : KANTOR DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR |

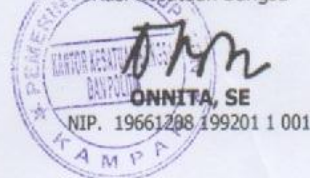
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 04 April 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kantor Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No. 45 Bangkinang

Nomor : 355/EX/DPC/XI/2019. Bangkinang, 15 Mei 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Balasan Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi**

Kepada Yang Terhormat :
 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
 di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring do'a kami, semoga Allah SWT. senantiasa menyertai Bapak dan jajaran dengan taufiq dan hidayahNya, Amiin.

Selanjutnya, bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kampar telah menerima dengan benar surat pengantar pelaksanaan kegiatan riset/para riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, telah dilaksanakan oleh **Ilham Gusmi (11324105458)**:

Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor DPC PPP Kabupaten Kampar

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua

HENDRA YANI, SE. MM



PIMPINAN HARIAN
 DPC PPP KABUPATEN KAMPAR
 Sekretaris

MUHAMMAD ANSAR, S.Ag. M.Pd

Tembusan, Yth:
 Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ilham Gusmi, Lahir di Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 04 Agustus 1994. Penulis lahir dari pasangan Dalmi dan Wernalis. Pendidikan formal yang telah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 008 Negeri Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangean (MTS) Miftahul Ma'arif. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Ma'arif (MAS). Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.

Tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-40 di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dalam Bidang organisasi, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2015-2016. Kemudian menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Pelajar Bandur Picak (HIMAPELBAPI) Periode 2015-2016. Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.